

## TAJUK RENCANA

### Saat Krusial Melawan Covid-19

**JUMLAH** kasus Covid-19 di DIY terus menunjukkan kecenderungan menurun. Hari Minggu (19/9), penambahan kasus 'hanya' 106, angka sembuh 331 dan meninggal 9 orang. Angka meninggal juga makin menurun sedang kesembuhan meningkat atau paling tidak di atas angka pertambahan kasus. Ini fenomena yang patut disyukuri dan diharapkan kondisinya akan terus membaik, sehingga pekan mendatang PPKM level 3 bisa diturunkan menjadi level 2 seperti di beberapa kota di Jawa Tengah.

Penurunan level PPKM akan berbanding terbalik dengan aktivitas masyarakat. Dengan menurunnya level PPKM, aktivitas masyarakat pun diperlonggar, namun tetap dengan pembatasan. Selagi masih dalam kerangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tentu aktivitas belum normal, artinya pembatasan masih tetap berlaku. Hal ini acap keliru dipahami, sehingga ada yang beranggapan dengan penurunan level maka masyarakat bebas beraktivitas tanpa pembatasan.

Melihat fenomena di masyarakat, agaknya banyak yang tidak sabar ingin menikmati kebebasan beraktivitas seperti dulu. Indikasi ini terlihat misalnya, masih cukup banyak warga melepas masker atau tidak tertib cuci tangan. Selain itu, masih menjadi pemandangan yang jamak warga berkerumun di area publik. Juga di tempat-tempat makan, pengelola belum menerapkan kebijakan yang ketat, baik menyangkut kapasitas maupun waktu makan.

Belum lagi di tempat-tempat wisata. DIY yang secara resmi belum membuka tempat wisata, namun beberapa destinasi, seperti wisata pantai sudah dijejali pengunjung. Kalau sebelumnya sempat marak calo tempat wisata, yakni warga yang mencari jalan tikus untuk menghindari penyetakan gerbang masuk, kini mereka mengakali dengan ma-

suk ke objek wisata sebelum pos penjagaan dibuka.

Sekadar menyebut contoh objek wisata Pantai Parangtritis yang secara resmi belum dibuka, namun ternyata ribuan pengunjung bisa masuk. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata mereka datang, termasuk bus-bus rombongan, sebelum pukul 08.00 (jam buka pos penjagaan) atau setelah pukul 18.00 (jam tutup pos penjagaan). Bahkan ada yang masuk ke objek wisata Pantai Parangtritis tengah malam atau pagi diri hari (KR 20/9). Mereka memang sengaja menghindari penyetakan.

Dari fenomena ini terlihat bahwa sebagian masyarakat tidak sabar untuk segera menikmati kebebasan tanpa dihilangi sekat, termasuk masuk ke tempat wisata. Mereka ingin melampiaskan kejenuhan selama masa PPKM yang notabene tak bisa berkunjung ke tempat wisata. Boleh dikata, inilah fenomena yang sering kita kenal dengan istilah 'revenge tourism' atau semacam tindakan balas dendam karena selama ini dibatasi.

Hemat kita, saat seperti sekarang ini justru perlu diwaspadai, jangan sampai masyarakat lengah hanya karena kasus Covid-19 menurun. Justru inilah saat-saat krusial yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan jangan sampai usaha kita selama ini memerangi pandemi Covid-19 sia-sia. Kita tak ingin kasus seperti di India yang masyarakatnya euforia karena menganggap Covid-19 telah sima sehingga mereka berkerumun tanpa menaati prokes sampai akhirnya meledak kasusnya.

Kita mendorong aparat di lapangan untuk tidak pakewuh menegur, bahkan memberi sanksi bagi para pelanggar prokes. Tempat-tempat wisata, kalau perlu dijaga 24 jam, sehingga tidak ada celah untuk lolos dari penjagaan. Inilah ikhtiar yang harus kita lakukan demi membebaskan diri dari cengkeraman Covid-19. □

# Batik, Sumur Inspirasi Penuh Tegangan

**PENYELENGGARAAN** *Jogja International Batik Biennale (JIBB)* sejak 2016 oleh Dekranasda DIY didukung Pemerintah DIY dan sejumlah institusi terkait, merupakan inisiasi otentik yang pantas dirayakan. *Borderless Batik: From Heritage to Millennial's Life Style* merupakan tema JIBB ke-3 pada 2021, yang ingin menegaskan bahwa seni batik memiliki daya tembus ke segala arah. Dan mengandaikan, batik sebagai pusaka budaya menjangkiti generasi milenial sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Sebuah harapan ambisius, sekaligus memerlukan skenario dan langkah nyata dari para pihak untuk mewujudkannya.

Ide JIBB tidak terlepas dari predikat prestisius dari *World Craft Council*: (WCC) pada 2014 yang menetapkan Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia. Latar yang lebih jauh lagi adalah ketika 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*, yang mengisyaratkan tanggung jawab besar bagi Pemda DIY dan para pemangku kepentingan dunia batik Yogyakarta.

Batik berada dalam ruang tumbuh dan ruang hidup yang khas: dari Kraton (sebagai penjaga nilai/filosofi), Kaprajan (sebagai fasilitator), Kampung (sebagai laboratorium dan pengembangan), dan Kampung (representasi perajin, masyarakat pengguna), yang bersinergi dengan unsur lain seperti desainer, industri fesyen, seniman, dan pedagang. Batik berada dalam ruang-ruang kepentingan yang saling beririsan, sekaligus berpeluang saling bertubrukan.

#### Dua Tahunan

Peristiwa dua tahunan (*biennale*) ini menjadi agenda penuh tegangan bertahap. Kehendak merawat dan mempertahankan mahkota dari UNESCO dan WCC, mereka yang *ngugemi* nilai filosofi, material, dan teknik; hasrat para seniman untuk mengeksplorasi nilai, proses, untuk melahirkan karya, makna, dan pengetahuan baru, serta dunia in-

#### Suwarno Wisetrotomo

dustri. Persoalan beragam ini berpotensi melahirakan tubrukan kepentingan antarpihak.

Para pemeluk teguh nilai-nilai batik tradisional, sering bersikap kaku dalam menilai yang 'baik dan benar'. Cenderung menegasi terhadap berbagai kemungkinan pengembangan. Sebaliknya seniman melihat batik sebagai 'sumur inspirasi'



KR-JOKO SANTOSO

untuk ditimba sebagai sumber ide menciptakan karya baru. Dalam pandangan saya, begitulah cara memperlakukan seni tradisional, yakni dengan cara membongkar untuk mencari keluasaan makna yang tersembunyi. Jika seni tradisional hanya dielus-elus atas nama *nguri-uri*, akan macet dan mati pelan-pelan.

Dunia industri (batik) membutuhkan ekosistem produksi-konsumsi yang lancar agar seluruh unsur terjaga kehidupannya. Potensi terjadinya gesekan kepentingan merupakan tantangan bagi akademisi untuk meneliti dan menerangkan maknanya, perkembangan, serta berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu diperlukan tata kelola yang jernih pada aspek konsep, kepentingan, dan keluasaan wawasan semua pihak.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Tantangan Berat Bangsa Kencana

**PANDEMI** Covid-19 memberikan dampak terhadap semua aspek kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa. Selain itu, banyak program pemerintah maupun swasta yang menghadapi tantangan berat. Salah satunya program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Betapa tidak, pandemi Covid-19 yang menyentuhkan 114 negara dengan total terkonfirmasi virus sebanyak lebih dari 151 juta jiwa dengan kasus meninggal 3,1 juta jiwa di tingkat dunia dan 4,1 juta jiwa terkonfirmasi serta 139.165 jiwa meninggal di Indonesia per 13 September 2021, telah membuat jutaan keluarga di Indonesia mengalami tekanan berat yang berdampak pada capaian program Bangga Kencana yang arahnya untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.

Secara garis besar, program Bangga Kencana menangani lima aspek yakni Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pengelolaan Kependudukan. Kelima aspek garapan Bangga Kencana tersebut di masa pandemi banyak mendapatkan tantangan, Pertama, upaya mendewasakan usia perkawinan sekarang ini terkendala oleh banyaknya kasus pemikahan dini.

Kedua, upaya pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat/obat kontrasepsi terkendala oleh kebijakan sosial dan physical distancing oleh pemerintah untuk menekan penularan virus yang demikian cepat karena ciri dan karakternya. Akibatnya pelayanan KB baik di klinik pemerintah maupun swasta tidak maksimal. Apalagi pelayanan pasien yang positif Covid-19 harus diprioritaskan. Kondisi ini telah mendorong BKKB untuk melakukan bakti sosial pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum hari besar nasional seperti Harganas, Hari Kontrasepsi

Sedunia, Hari Kependudukan Sedunia, Hari Vasektomi Sedunia dan lain-lain.

Ketiga, upaya pembinaan ketahanan keluarga juga terkendala kebijakan yang sama sehingga kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak bisa optimal. Pertemuan dibatasi bahkan di banyak tempat berhenti sama sekali. Meskipun di beberapa wilayah berkreasi melakukan pertemuan secara daring, tetapi cakupannya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah kelompok yang jumlahnya puluhan ribu.

Keempat, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor (UPPKA) terkendala oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan, atau menurunnya frekuensi kerja/upah karena permintaan pasar yang menurun. Akibatnya produk UPPKA tidak bisa teresap maksimal dan berpengaruh terhadap keuangan kelompok.

Kelima, upaya pengelolaan kependudukan terutama dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitasnya terkendala oleh terbatasnya kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan. Demikian juga dengan penerbitan administrasi kependudukan baik bagi keluarga maupun individu penduduk. Upaya penyeimbangan distribusi penduduk melalui transmigrasi pun terkendala oleh kebijakan daerah tujuan.

Meskipun banyak kendala, namun kita tidak boleh berputus asa. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, tentu masih banyak hal bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Bangga Kencana. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, berkreasi dan berinovasi. □

**Drs Mardiyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Daldud dan KB Kabupaten Kulonprogo.**

## SDI untuk Penanganan Kemiskinan di DIY

**PROGRAM** satu data Indonesia (SDI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 39 tahun 2019. Yang menyatakan penciptaan SDI dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data tunggal yang dihasilkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Secara praktis SDI sangat dibutuhkan karena data adalah kunci utama yang dimiliki pemerintah untuk mengintegrasikan layanan pemerintah yang saat ini kondisinya masih tersebar, beragam dan belum terstandarisasi.

Pandemi Covid-19 dilihat dari sisi positif memberikan banyak pelajaran. Salah satunya kita 'terpaksa atau dipaksa' menggunakan teknologi di tengah keterbatasan kegiatan secara luring (tatap muka). Termasuk juga pemerintah yang mengambil arti penting pandemi Covid-19 dengan mentransformasikan diri beralih menggunakan layanan digital dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

#### Urgensi Data

Kualitas data sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Data merupakan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Jika data yang dimiliki pemerintah masih tersebar, beragam dan tidak terstandarisasi serta belum tercukupi, akan mempengaruhi agenda-agenda pemerintah seperti pemulih ekonomi nasional yang berakibat inefisiensi atau pemborosan sumber daya. Selain itu beberapa program pemerintah masih ada yang kurang tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini disebabkan antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak selaras sehingga tidak berdampak besar pada sasaran masyarakat yang dituju.

Salah satu contohnya adalah program bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Keputusan Presiden tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional

#### Anif Muchlashin

telah diikuti peraturan lainnya terutama tentang bantuan sosial. Salah satunya akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Kementerian/Lembaga/Perusahaan BUMN/BUMD dan swasata melalui dana *corporate social responsibility* (CSR) telah banyak mengeluarkan sejumlah bantuan sosial dengan sarasannya masyarakat miskin dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Kepedulian dalam memberikan bantuan sosial dalam pelaksanaannya tidak menggunakan data yang terintegrasi. Akibatnya, muncul banyak data ganda. Sehingga ada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan sosial apapun. Hal ini sangat berdampak pada penanganan kemiskinan di DIY. Karena bantuan sosial yang diharapkan dapat menolong masyarakat miskin dan rentan miskin jatuh lebih dalam pada jurang kemiskinan malah tidak tertolong dengan adanya perlindungan sosial dari pemerintah.

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah. Namun perbedaan dan belum *ter-update-nya* data dari pemerintah pusat dan daerah menyebabkan program bantuan sosial tidak memberikan perlindungan sosial. Yang terjadi justru menimbulkan konflik antarmasyarakat.

Sebab, ada yang mendapatkan bantuan sosial dua kali seperti bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial, dan juga sekaligus dapat mengakses bantuan pra kerja dan atau bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Di sisi lain ada masyarakat yang bukan ber-KTP Yogyakarta tetapi domisili di

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

#### Kabar Baik

Wacana akan dibentuknya satu data terintegrasi oleh pemerintah menjadi kabar baik. Semoga segera diwujudkan serta secepatnya dapat digunakan untuk banyak hal salah satunya program penanganan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam proses satu data terpadu.

Pemberian informasi yang jujur dan apa adanya akan memberikan kontribusi besar bagi terciptanya SDI. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) untuk tidak disebarkan ke sembarang orang. Karena data yang digunakan pemerintah nantinya adalah menggunakan basis data NIK. □

**\*) Anif Muchlashin SSos MSc, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah-Bappeda DIY**

## Pojok KR

Pengunjung Pantai Parangtritis tak bisa dibendung.

-- Bisa, kalau ada upaya sungguh-sungguh.

\*\*\*

Uji PTM di DIY, selesai jam pelajaran langsung pulang.

-- Tetap masih harus dievaluasi.

\*\*\*

Pelaku pariwisata didorong ajukan QR Code.

-- Hanya salah satu ikhtiar, kuncinya prokes.

*Berada*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk23@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Prof Mohr Yamin No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Lempur Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.